

## Pengawasan Internal untuk Pencegahan Kecurangan Keuangan di Kantor Pos Meulaboh 23600

Abdi Lutfi Azhari<sup>1\*</sup>, Budianto<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [abdiluthfi12@gmail.com](mailto:abdiluthfi12@gmail.com)<sup>1</sup>, [budianto@utu.ac.id](mailto:budianto@utu.ac.id)<sup>2</sup>

### Artikel info

#### Artikel history:

Diterima : 28-10-2021

Diterima dalam bentuk revisi : 12-11-2021

Diterima untuk publish : 14-11-2021

**Kata Kunci:** pengawasan internal; audit internal; pencegahan kecurangan

**Keywords:** *internal control; internal audit; fraud prevention*

#### Abstrak :

Sebagai perusahaan yang mencari laba dan salah satu perusahaan milik negara, Kantor Pos harus mengelola keuangannya dengan baik sehingga bisa menjadi pemasukan bagi negara secara maksimal. Untuk itu, kantor pos memiliki pengawasan internal keuangan agar pengelolaan keuangannya sesuai dengan prosedur perusahaan dan bisa terhindar dari tindak kecurangan sehingga pengelolaannya bisa lebih baik. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat pengawasan internal untuk pencegahan kecurangan dibagian keuangan di kantor pos Meulaboh. Topik ini diangkat karena penulis tertarik melihat audit yang di lakukan kantor pos Meulaboh pada saat melakukan pemeriksaan di bagian keuangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung bagaimana kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang terjadi di Kantor Pos Meulaboh. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal sangat berpengaruh dan efektif dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kecurangan. Dengan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan secara rutin menjadikan pengawasan ini efektif untuk mencegah kecurangan (*fraud*), sehingga berdampak baik bagi perusahaan karena kecilnya peluang untuk melakukan kecurangan.

#### Abstract :

*As a profit-seeking company and one of the state-owned companies, the Post Office must manage its finances well so that it can become maximum income for the state. For this reason, the post office has internal financial supervision so that its financial management is in accordance with company procedures and can avoid fraud so that its management can be better. This writing aims to find out and see the internal control for fraud prevention in the finance department at the Meulaboh post office. This topic was raised because the author is interested in seeing the audits carried out by the Meulaboh post office when conducting an audit in the finance department. In this research, the writer uses descriptive qualitative method with a case study approach, namely by observing or observing directly how the activities or work activities that occur at the Meulaboh Post Office. The conclusion of this study shows that internal control is very influential and effective in minimizing and preventing fraud. With supervision or inspection carried out regularly, this supervision is effective in preventing fraud (*fraud*), so that it has a good impact on the company because there is little opportunity to commit fraud.*

**Koresponden author: Abdi Lutfi Azhari**

Email: [abdiluthfi12@gmail.com](mailto:abdiluthfi12@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



## Pendahuluan

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan curang atau penipuan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan secara pribadi yang dapat berdampak pada kerugian pihak lain. Kecurangan dengan segala bentuk dan modusnya telah membawa dampak buruk bagi organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik ([Anugerah, 2014](#)). Kecurangan sangat berdampak besar bagi institusi atau lembaga perusahaan, seperti kasus perusahaan milik BUMN, PT. Jiwasurya terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh tim pengelola investasi Jiwasurya yang melanggar aturan pedoman Jiwasurya. Dari hasil penyidikan kejaksaan agung disebutkan Jiwasurya diduga melakukan penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan manajer investasi yang melanggar tata kelola perusahaan yang menyebabkan bangkrutnya perusahaan dan kerugian negara senilai Rp 12,157 triliun ([CNBC Indonesia, 2020](#)).

Kecurangan menjadi sebuah masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Tidak ada Institusi/ lembaga perusahaan yang benar-benar terbebas dari kemungkinan terjadi adanya kecurangan ([Association of Certified Fraud Examiners, 2019](#)). Oleh karena itu perlu tindakan atau kepedulian terhadap potensi adanya kecurangan. Beberapa kasus kecurangan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak ada atau kurangnya pengendalian internal, kontrol atau pengawasan yang lemah, tingkat kejujuran yang rendah, dan lain sebagainya. Institusi atau lembaga perusahaan harus memiliki cara atau tindakan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud* seperti melakukan pengawasan terhadap internal perusahaan. Terlebih lagi pengawasan terhadap keuangan atau aset di institusi/lembaga perusahaan. Karena aset atau keuangan dalam perusahaan merupakan salah satu pemicu seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan kecurangan.

Tindakan kecurangan terhadap keuangan ini harus terus diperhatikan dan diawasi agar dapat meminimalisir dan juga sebagai upaya pencegahan terhadap kecurangan tersebut, karena tindakan kecurangan bisa berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam suatu perusahaan, kinerja keuangan merupakan faktor penting bahkan menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan demi kelangsungan perusahaan tersebut ([Rajagukguk, 2017](#)). Dengan adanya kinerja keuangan, kita dapat melihat informasi mengenai keberhasilan suatu perusahaan dalam mengatur atau mengelola aset perusahaan. Maka melakukan pengawasan keuangan dalam perusahaan merupakan suatu hal yang penting sebagai upaya untuk meminimalisir bahkan dapat mencegah terjadinya kemungkinan kecurangan dalam perusahaan. Pengawasan merupakan cara atau proses memastikan bahwa semua kegiatan pekerjaan yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan guna mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Pada penelitian sebelumnya di simpulkan bahwa “Pengawasan keuangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan” ([Anggaraeni, Purnamawati, Atmadja, & SE, 2015](#)). Dengan adanya pengawasan yang dapat berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan, maka tindakan kecurangan dapat di minimalisirkan atau dihindarkan. Hal inilah yang banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan, termasuk PT Pos Indonesia dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Kantor Pos Indonesia merupakan salah satu dari perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa dan layanan pos. Saat ini Kantor Pos memiliki banyak pelayanan, tidak hanya melayani pengiriman barang saja, sudah banyak transaksi yang bisa dilakukan di kantor Pos seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan (seperti listrik, air, internet), pembayaran pajak dan masih banyak lagi. Sebagai perusahaan dan menjadi salah satu perusahaan BUMN, tentunya PT Pos Indonesia mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba dan dapat menjadi pemasukan bagi negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Pos harus bisa mengelola aset atau kekayaan dengan baik serta menjaga aset atau kekayaannya dari segala bentuk tindakan kecurangan (*fraud*). Salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan bisa dengan melakukan pengawasan keuangan internal perusahaan supaya berjalan sesuai dengan prosedur perusahaan. Ini juga yang dilakukan Kantor Pos Meulaboh dalam mencegah terjadinya praktik kecurangan.

Kantor Pos Meulaboh merupakan salah satu bagian dari kantor pos yang berada di kota Meulaboh, Aceh Barat. Kantor pos Meulaboh membawahi beberapa kantor pos cabang yang ada di sekitar wilayah kerjanya. Semua kantor pos cabang tersebut melaporkan atau menyerahkan berkas atau uang dari hasil transaksi-transaksi ke kantor pos Meulaboh terlebih dahulu sebelum diteruskan ke kantor pos pusat. Sebagai upaya untuk mengelola keuangan yang baik dan agar terhindar dari tindakan kecurangan yang mungkin dapat terjadi, kantor pos Meulaboh menerapkan pengawasan internal keuangan untuk meminimalisir atau mencegah dari praktik kecurangan. Pengawasan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan dan agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh seorang, kelompok, atau pihak tertentu.

Kecurangan (*fraud*) adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi (Karyono, 2013). Menurut ([Association of Certified Fraud Examiners](#), 2019). ada beberapa media yang dapat mendeteksi kecurangan (*fraud*), beberapa diantaranya seperti audit internal, audit eksternal, dan pemeriksaan dokumen.

#### 1. Audit Internal

Audit internal dapat menjadi sebagai media deteksi awal *fraud*, karena audit internal adalah salah satu pengendalian internal dalam perusahaan atau organisasi yang dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya *fraud*.

#### 2. Audit Eksternal

Audit eksternal dapat menjadi media deteksi kecurangan, karena audit eksternal merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan, sehingga audit eksternal dapat menjadi filter apabila terdapat ketidaksesuaian dari laporan keuangan yang dihasilkan.

#### 3. Pemeriksaan Dokumen

Pemeriksaan dokumen adalah salah satu cara yang dapat menjadi media deteksi, karena dokumen adalah bukti utama yang harus ditunjukkan atas setiap aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan, jadi apabila ada ketidaksesuaian dokumen yang ditemukan, maka bisa menjadi indikasi yang perlu diperhatikan sebagai praktik yang menyimpang.

Kecurangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh satu individu atau kelompok yang dapat merugikan suatu instansi atau lembaga perusahaan. Oleh karena itu, harus dilakukan penanganan atau tindakan sebagai upaya meminimalisir atau mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan.

Menurut Mulyadi (2017) dalam Humam, et al., (2020), pengendalian internal adalah meliputi struktur organisasi, cara-cara, dan alat-alat yang dikoordinasikan didalam perusahaan untuk menjaga keamanan harta (*asset*) milik perusahaan, mengusut ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mengoptimalkan efisiensi operasional, serta menaikkan tingkat pelaksanaan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pengendalian merupakan suatu langkah atau proses yang dijalankan instansi/lembaga perusahaan yang dapat berupa kebijakan atau prosedur yang dirancang guna mencapai tujuan instansi/lembaga perusahaan. Pengendalian internal harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan organisasi melalui sebuah sistem yang telah didesain sedemikian rupa serta perlu diawasi dengan baik dan benar (Soleman, 2013).

Menurut (Mubin, Rustandy, Lokamandala, & Nasihin, 2019), Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya *fraud*, perusahaan perusahaan atau organisasi harus menerapkan program anti *fraud* yang berupa pengendalian internal. Pengendalian internal yang dilakukan dapat berupa pengawasan internal yang bertujuan untuk mengawasi dan memeriksa aktivitas atau kegiatan pekerjaan agar sesuai dengan standar perusahaan untuk dapat dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan.

Pengawasan atau sering disebut juga pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula (M. A. Firmansyah & Mahardhika, 2018). Pengawasan adalah suatu kegiatan pengamatan terhadap seluruh aktivitas organisasi atau perusahaan untuk menilai apakah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan sudah berjalan sesuai prosedur atau tidak. Pengawasan dimaksudkan untuk menilai dan mengukur hasil dari pekerjaan yang dilakukan, membandingkan kegiatan pekerjaan dengan standar atau prosedur dan dapat menjadi pengoreksi dari penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui perbaikan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal (Ponamon, 2014).

Menurut Umar Husein (2003) pengawasan memiliki berbagai fungsi pokok, yaitu :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan.
2. Dapat menjadi perbaikan berbagai penyimpangan.
3. Mendinamisasikan organisasi. Diharapkan dengan adanya pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan sedini mungkin.
4. Mempertebal rasa tanggungjawab. Dengan adanya pengawasan, setiap karyawan dan semua bagian organisasi akan selalu bekerja sesuai dengan prosedur atas semua pekerjaan yang dilakukan.

Menurut ([I. Firmansyah](#), 2020) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) di PT Perkebunan Nusantara VIII, menyimpulkan bahwa “Penerapan serta berjalan baiknya suatu audit internal dan pengendalian internal dalam perusahaan dapat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)”. Dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Audit Internal Dan Efektivitas Pengendalian Interen Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) yang disusun oleh Maliawan, et al., (2017), menyimpulkan bahwa “Audit internal dan efektivitas pengendalian interen berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh ([Widanarto](#), 2012) menyebutkan bahwa “Proses pengawasan dalam bentuk penentuan standar untuk pengawasan, pengukuran hasil pekerjaan, perbandingan hasil pekerjaan dengan standar, dan koreksi terhadap penyimpangan memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan kinerja”. Kesimpulan dari beberapa penelitian yang dilakukan diatas, hal ini menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal dapat berpengaruh dan efektif terhadap pencegahan kecurangan. Dan dengan adanya pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja, maka pekerjaan tersebut akan dilakukan dengan benar dan tertata sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih jelas dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pengawasan internal yang dilakukan kantor pos Meulaboh untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Penelitian ini juga melihat sistem pengawasan pada saat ini dengan menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi untuk melakukan penelitian pada masa ini.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu ([Wahyuningsih](#), 2013). Studi kasus merupakan salah satu cara atau metode penelitian dengan melakukan pemeriksaan terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisi informasi, dan pelaporan hasilnya. Penelitian ini tidak menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pos Meulaboh. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan keuangan internal yang di lakukan Kantor Pos Meulaboh untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara pada beberapa orang dibagian keuangan seperti manajer keuangan dan kasir pada bagian keuangan, serta pengumpulan berkas pemeriksaan atau pengawasan internal di bagian keuangan kantor Pos Meulaboh. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, yaitu dari bulan Maret sampai bulan Agustus pada saat penulis menjalani kegiatan magang pada tahun 2021.

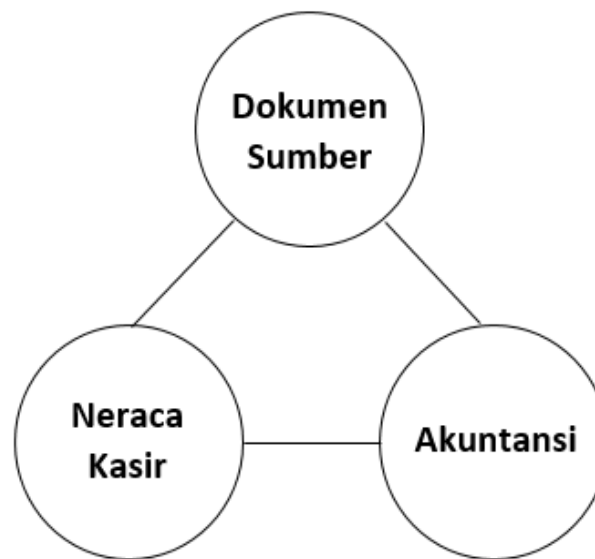
## **Hasil dan Pembahasan**

Kantor Pos Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1746 di Batavia (Jakarta). Kantor Pos Indonesia merupakan badan usaha atau perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan berfungsi sebagai pelayanan publik, sampai saat ini kantor Pos Indonesia telah berkembang pesat dalam bidang perposan, dan telah tersebar diberbagai daerah di seluruh Indonesia termasuk kantor Pos yang ada di Meulaboh. Kantor Pos Meulaboh merupakan Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) dan membawahi 12 Kantor Pos Cabang (KPC) yang ada disekitarnya. Sebagai perusahaan laba, tentunya kantor Pos memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagai pemasukannya, dan pemasukan untuk kas negara karena kantor Pos juga merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengelolaan keuangan yang baik sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan menunjang keberhasilan perusahaan. Untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik, harus benar-benar orang yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya dan dapat dipercaya, agar pengelolaan keuangannya jelas atau sesuai prosedur perusahaan dan terhindar dari praktik kecurangan. Dalam hal ini, sebagai upaya untuk mencegah dari tindakan kecurangan, kantor Pos Meulaboh melakukan pengawasan internal terhadap keuangan, agar pengelolaan keuangan yang dilakukan pegawainya telah sesuai dengan standar atau prosedur perusahaannya dan tidak menyalahi aturan perusahaan. Ada dua pengawasan yang terdapat dikantor pos Meulaboh, yaitu Segitiga Pengawasan dan pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh manajer audit.

### **A. Segitiga Pengawasan**

Segitiga pengawasan merupakan hubungan atau keterkaitan pekerjaan antara tiga objek yang berada di bagian keuangan kantor Pos Meulaboh. Ketiga objek tersebut adalah Dokumen sumber, Neraca kasir, dan Akuntansi.



**Gambar 1. Segitiga Pengawasan**

- a. Dokumen Sumber, merupakan berkas atau bukti-butki transaksi yang terjadi di kantor pos Meulaboh.
- b. Neraca Kasir, pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di bagian keuangan. dikerjakan oleh kasir di bagian keuangan.
- c. Akuntansi, pencatatan akuntansi yang ada di kantor pos Meulaboh. Dikerjakan oleh manajer akuntansi.

Ketiga objek ini memiliki hubungan karena membutuhkan data satu satu sama lain. Seperti dokumen sumber yang merupakan bukti-bukti transaksi, dokumen sumber ini diperlukan neraca kasir untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada di bagian keuangan, dan hasil pencatatan dari neraca kasir dibutuhkan oleh akuntansi sebagai dasar pecatatan di akuntansi dan juga membuktikan data dari dokumen sumber. Dengan adanya ketiga hubungan antara pekerjaan ini, dapat menjadikannya sebagai pengawasan internal secara tidak langsung karena saling memerlukan data. Dan hubungan pekerjaan ini dilakukan oleh orang yang berbeda, sehingga kemungkinan untuk melakukan kecurangan sangatlah kecil, karena apabila ada data yang tidak sesuai dapat langsung ketahuan. Segitiga pengawasan ini cukup efektif untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan.

## **B. Pengawasan Internal Keuangan**

Pengawasan internal yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang ingi dicapai. Oleh karena itu, pengawasan internal sebagai upaya meminimalisir dan pencegahan tindak kecurangan dapat dikatakan penting. Pengawasan yang dilakukan kantor pos Meulaboh berupa pemeriksaan berkas, mencocokkan kesesuaian berkas atau pekerjaan, dan menilai aktivitas pekerjaan sesuai dengan standar perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan kantor pos Meulaboh hampir sama dengan pemeriksaan audit, oleh karena itu pengawasan internal kantor pos Meulaboh juga dapat

dikatakan audit internal. Pengawasan atau audit internal ini merupakan pengawasan atau pemeriksaan skala kecil atau sebagai langkah awal sebelum pemeriksaan yang dilakukan Satuan Pengawasan Internal (SPI). Pengawasan dilakukan oleh manajer audit yang diberi surat tugas/surat izin untuk melakukan pemeriksaan kepada karyawan-karyawan kantor pos Meulaboh.

## 1. Bagian Yang Dilakukan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan kantor Pos Meulaboh merupakan pengawasan secara langsung dengan memeriksa berkas-berkas dan mencocokkannya dengan prosedur perusahaan. Berikut bagian-bagian pemeriksaan yang dilakukan di bagian keuangan di kantor Pos Meulaboh :

### a. Pemeriksaan pada keuangan (kas)

- 1) Pemeriksaan terhadap pagu kas : Pagu Kas merupakan batas saldo kas yang dapat disimpan di kantor pos baik berupa uang tunai maupun uang yang ada direkening dan dapat digunakan untuk memenuhi transaksi-transaksi yang ada di kantor pos. Untuk pagu kas kantor Pos Meulaboh adalah sebesar Rp 450 Juta, sesuai dengan SE 013/Dir-1/0321 tentang batas maksimal dana yang boleh ditahan dan kas kecil tahun 2021.
- 2) Pemeriksaan terhadap aplikasi/web ITEMS : Aplikasi/web ITEMS (Integrated Treasury Management System) adalah web untuk pengelolaan data keuangan seluruh kantor pos Indoensia. Terdapat dua laporan keuangan yang ada di ITEMS, yaitu laporan kas (berupa laporan harian, bulanan, dan tahunan) dan laporan realisasi pelimpahan dan pembebanan. Pelimpahan merupakan pentransferan uang dari transaksi-transaksi pada hari itu ke Direktur Keuangan kantor Pos pusat. Dan sedangkan pembebanan adalah pengajuan dana atau permintaan dana kepada kantor Pos pusat untuk keperluan yang ada di kantor Pos Meulaboh seperti melakukan pengajuan dana untuk pembayaran uang pensiun.
- 3) Pemeriksaan terhadap anasir kas : Anasir kas merupakan pencatatan saldo keuangan harian kantor pos meulaboh. Anasir kas juga merupakan buku bantu saldo keuangan untuk pengisian laporan keuangan pada web ITEMS.
- 4) Pemeriksaan terhadap Per-1 dan G-15 : Per-1 dan G-15 adalah buku atau laporan pengawasan saldo Benda Pos dan Meterai (BPM). yang membedakannya adalah Per-1 adalah laporan harian, sedangkan G-15 adalah laporan bulanan. Pemeriksaan yang dilakukan seperti pencocokan fisik meterai dan prangko terhadap pencatatan persediaan BPM.
- 5) Pemeriksaan terhadap rincian pendapatan : Rincian pendapatan adalah pendapatan atau keuntungan yang diterima kantor Pos dari hasil penjualan Meterai. Meterai merupakan produk dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sejak awal kemunculan meterai, DJP sudah bekerjasama dengan Pos Indonesia untuk membantu penjualan meterai tersebut. Dengan kerjasama tersebut, Pos Indonesia mendapat keuntungan dari penjualan meterai tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 526 per keping meterai yang dijual.



b. Pemeriksaan pada Benda Pos dan Meterai (BPM)

- 1) Laporan penjualan Meterai : Laporan ini adalah laporan hasil penjualan meterai yang terjadi di setiap harinya.
- 2) Bukti serah terima panjar BPM : Bukti serah terima panjar BPM ini adalah bukti atau pencatatan pada saat panjar BPM, seperti bukti serah terima panjar BPM antara manajer keuangan dan kasir, atau antara manajer keuangan dan manajer pelayanan.
- 3) SIM Konsfilla : adalah aplikasi sistem yang digunakan untuk mengentry berbagai data, salah satunya pengentryan yang berkaitan dengan BPM seperti pemesanan meterai, stok meterai dan lain-lain.
- 4) Surat Setoran Pajak : adalah laporan billing hasil penjualan meterai pada hari itu yang dilaporkan ke DJP online, dan surat tersebut di print sebagai bukti telah melakukan pelaporan billing.
- 5) Berita Acara Penelitian Penjualan : adalah laporan dari kantor pajak setempat dalam hal ini KPP Pratama Meulaboh, tentang pendapatan yang diterima kantor pos dari penjualan meterai dan laporan bahwa sudah di kirim pendapatan tersebut ke rekening pusat.

c. Langkah Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh manajer audit sendiri dengan mengikuti format atau pedoman pemeriksaan yang telah disediakan oleh Pos Indonesia. Berikut pedoman langkah kerja pemeriksaan yang dilakukan kantor pos Meulaboh.

**Tabel 1. Pedoman Pemeriksaan Kantor Pos Meulaboh**

<b>Pedoman Pemeriksaan</b>			
<b>ICQ</b>	<b>Hasil Pemeriksaan</b>		<b>Langkah Kerja Pemeriksaan</b>
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	
Apakah nilai persediaan sesuai/cocok dengan daftar panjar			Periksa dan hitung fisik panjar dengan form C-6 cocokan dengan tandaterima panjar.
Apakah jumlah permintaan BPM yang dilakukan telah dipertanggungjawabkan dalam neraca loket			Periksa buku permintaan BPM dan cocokan dengan neraca loket
Apakah tidak terjadi penahanan kas berlebih menjelang akhir libur ( <i>weekend</i> )			Periksa saldo kas dan bandingkan dengan pagu kas yang telah ditentukan

Pada langkah pemeriksaan ini, manajer audit mengikuti panduan dari pedoman pemeriksaan yang telah diberikan. Pertama dengan melihat ICQ atau daftar pertanyaan yang telah dibuat, selanjutnya manajer audit memeriksa data atau kesesuaian berkas sesuai dengan instruksi pada langkah kerja pemeriksaan. Setelah memeriksa berkas, manajer audit mengisi hasil pemeriksaan telah sesuai atau tidak, jika terjadi temuan atau ada berkas yang tidak lengkap manajer audit akan memberikan waktu sesuai dengan perjanjian dengan pihak yang diperiksa. Jika dalam yang telah disepakati atau ditentukan pihak yang diperiksa belum bisa memberikan berkas yang diminta manajer audit, maka hal ini akan dianggap sebagai temuan dan akan ditindak lanjuti dan diserahkan kepada kepala Kantor Pos Meulaboh. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan Widaningsih & Hakim, (2015) dengan memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya profesionalisme audit internal dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dan penelitian yang dilakukan ([Ponamon, 2014](#)), dengan kesimpulan bahwa pengawasan internal memiliki positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Kesimpulan**

Pengawasan internal atau audit internal telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur pedoman pemeriksaan oleh manajer audit. Pengawasan atau audit internal yang dilakukan kantor pos Meulaboh terbukti efektif dan berpengaruh dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Audit internal yang dilakukan setiap bulannya dengan cara tiba-tiba atau tidak memberitahu membuat pihak-pihak yang merasa akan diperiksa harus selalu siap dengan berkas yang akan diperiksa. Dengan adanya pengawasan internal seperti segitiga pengawasan yang saling terhubung dan audit internal, serta pemakaian sistem seperti web dan aplikasi pada pekerjaan membuat kecilnya peluang seseorang untuk melakukan kecurangan. Dengan penerapan pengawasan internal di kantor pos Meulaboh, seharusnya dapat menjadikan karyawan selalu bekerja sesuai dengan standar dan prosedur perusahaan, agar pekerjaan yang dilakukan jelas dan tidak merugikan pihak lain. Selain efektivitas dan berpengaruhnya pengawasan internal terhadap pencegahan kecurangan yang dilakukan kantor pos Meulaboh, kantor pos akan terus meningkatkan sistem dalam pekerjaan seperti mengentry berbagai data di sistem sehingga data tersebut sulit untuk di manipulasi dan dapat lebih mengecilkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

### Bibliografi

- Anggaraeni, M., Purnamawati, I. G. A. & Atmadja, A. T., 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3. <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5244>
- Anugerah, R., 2014. Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Akuntansi*, Volume 3, pp. 101-113.
- Association of Certified Fraud Examiners, 2019. *Survei Fraud Indonesia 2019*, Jakarta: Acfe Indonesia Chapter.
- CNBC Indonesia, 2020. *Terungkap Audit Internal Sudah Lama Cium Skandal Jiwasraya*. [Online] Available at: <https://www.cnbcindonesia.com> [Accessed 11 Juli 2021].
- Firmansyah, I., 2020. Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Di Pt Perkebunan Nusantara VIII. *Land Journal*, Volume 1, pp. 108-219. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.705>
- Firmansyah, M. A. & Mahardhika, B. W., 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Karyono., 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: ANDI.
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2017). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2).
- Ponamon, I. F., 2014. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume 9, pp. 68-80. <https://doi.org/10.32400/gc.9.2.5060.2014>
- Rajagukguk, T. S., 2017. Pengaruh Internal Audit Dan Pencegahan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 1, pp. 8-21.
- Rustandy, T., Nasihin, I., Lokamandala, M. A. & Mubin, M., 2019. The Effect Of Internal Audit On Fraud Prevention At PT Pos Indonesia. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, Volume 1, pp. 126-135. <https://doi.org/10.35310/jass.v1i02.232>
- Soleman, R., 2013. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporatae Governance Terhadap Pencegahan Fraud. Volume 17, pp. 57-74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5>
- Wahyuningsih, S., 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM PRESS.

- Widanarto, A., 2012. Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), pp. 1-73.
- Yulifah, A., & Irianto, G. (2014). Persepsi Auditor Eksternal tentang Determinan Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.